Jilid

RENCANA AKSI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(BPKD)
TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN PESISIR SELATAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN							RENCANA												REALISASI												PE
			TW I	TW II	TW III	TW IV			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)		RENCANA AKSI	TW I			TW II			TW III			TW IV			TW I			TW II			TW III			TW IV			C
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		(2)	(3)				(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)												(12)												
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	1	Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu	5%	25%	65%	100%	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Tersedianya buku rancangan PERDA tentang APBD Pengelolaan keuangan daerah	buku	100	146,196,157	1	Menyusun TIM																									A
														2	Penyusunan Ranperda APBD																									
														3	Pembahasan Ranperda APBD																									
														4	Pengesahan/Penetapan																									
								2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Tersedianya buku rancangan PERDA tentang penjabaran APBD	buku	100	151,355,326	1	Penyusunan Ranperbup ttg Penjabaran APBD																									A
														2	Pembahasan Ranperbup ttg Penjabaran APBD																									
														3	Pengesahan/Penetapan																									
								3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tersedianya buku rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	buku	100	104,714,378	1	Menyusun TIM																									A
														2	Penyusunan Ranperda Perubahan APBD																									
														3	Pembahasan Ranperda Perubahan APBD dengan TAPD dan Banggar																									
								4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya buku rancangan PERDA tentang penjabaran perubahan APBD	buku	100	216,784,295	1	Penyusunan Buku Ranperbup tentang Penjabaran perubahan APBD																									A
								5	Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya buku DPA SKPD	buku	516	95,705,062	1	Menyusun Tim																									
														2	Verifikasi DPA																									A
														3	Cetak Buku DPA																									
								6	Penyusunan DPA Perubahan SKPD	Tersedianya buku perubahan DPA SKPD	buku	516	51,758,337	1	Cetak DPA Pergeseran I																									
														2	Cetak DPA Pergeseran II																									A
														3	Cetak DPA Perubahan																									
								7	Pedoman Penyusunan RKA	Jumlah Tersusunnya buku Standar Biaya (Pedoman Penyusunan RKA) dan Terselenggaranya	Persen	100	41,719,716	1	Menyusun Tim																									
														2	Rapat Koordinasi dengan OPD Terkait																									A
														3	Penyusunan Dokumen Standar Biaya untuk Penyusunan RKA																									
	2	Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	40%	60%	80%	100%	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya buku laporan keuangan pemerintahan daerah	buku	90	86,727,436	1	Pengumpulan data SKPD																									Kab
														2	Rekonsilasi dengan SKPD																									A
														3	Konsolidasi Laporan Keuangan																									
														4	Pengumpulan data BMD																									
														5	Finalisasi Laporan Keuangan																									
														6	Penyerahan LK ke BPK																									
														7	Audit LK oleh BPK dan Penyampaian Opini																									
							Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Terselesaikannya kasus terhadap keuangan daerah melalui penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah	persen	10000%	57,163,487	1	Pembentukan Tim Keruda																									Kab
														2	Pembentukan Majelis Keruda																									A
														3	Rapat Tim secara Periodik																									
														4	Follow Up kasus																									
														5	Laporan ke BPK																									
							Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	buku	90	81,457,678	1	Penyusunan Draf Ranperda dan Lampiran																									Kab
														2	Penerimaan Opini BPK																									A
														3	Penyusunan Ranperda dan lampiran sesuai LHP BPK																									
														4	Penyampaian Ranperda ke DPRD																									
														5	Pembahasan dan Persetujuan Bersama																									
														6	Evaluasi Gubernur																									
														7	Penetapan Perda dan penyampaian Laporan ke Kementrian Keuangan																									

3	Penunjang Bendahara Umum Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan Daerah	bulan	12	795,284,342	1	Menerbitkan SP2D
						2	Pencatatan Kegiatan ke Kartu Kendali
						3	Membuat penetapan SK Bupati tentang SK PA/ KPA dan Rekening Bank, Nagari, Sekolah dan Puskesmas
						4	Evaluasi Non Tunai
						5	Menerbitkan SKPP
						6	Melakukan Pembinaan kepada SKPD dalam Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah
4	Pengelolaan Dana Transfer	Terlaksananya pengelolaan dana transfer sesuai peraturan perundang-undangan	bulan	12	15,003,992	1	Melakukan Rekon DAU dengan Kementrian Keuangan
						2	Melakukan Rekon Tunjangan Guru dengan Kemendikbud dan Kemenkeu
						3	Melakukan Rekon dana transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan Kemenkeu
						4	Mengirimkan Laporan Informasi Keuangan Daerah data PNSD via Aplikasi SIKD Kemenkeu
						5	Membuat dan Mengirimkan Laporan Tunjangan Guru (DAK Non Pisik) via Aplikasi ALADIN Kemenkeu
						6	Membuat dan Mengirimkan Laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Pisik) via Aplikasi ALADIN Kemenkeu
						7	Membuat dan Mengirimkan Laporan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik) via aplikasi ALADIN Kemenkeu
						8	Membuat dan Mengirimkan Laporan BOP PAUD (DAK Non Fisik) via aplikasi ALADIN Kemenkeu
						9	Membuat dan Mengirimkan Laporan ADMINDUK (DAK Non Fisik) via aplikasi ALADIN Kemenkeu
						10	Menyiapkan dan mengirim dokumen penyaluran DAK Fisik via Aplikasi OMPSAN
						11	Membuat dan Mengirimkan Laporan Infrastruktur ke Kemenkeu
						12	Membuat dan Mengirimkan Laporan Dana Insentif Daerah ke Kemenkeu
						13	Mengirimkan Laporan Konfirmasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ke Kemenkeu
						14	Membuat dan mengirimkan laporan konfirmasi dana bagi hasi propinsi
						15	Menyiapkan dan mengirim laporan dana desa via Aplikasi OMPSAN
						16	Melakukan Rekon Dana Bagi Hasil Propinsi dengan Badan Keuangan Daerah Propinsi
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBD	buku	100	105,475,192	1	Penyusunan Draf Ranperda dan Lampiran
						2	Penerimaan Opini BPK
						3	Penyusunan Ranperda dan lampiran sesuai LHP BPK
						4	Penyampaian Ranperda ke DPRD
						5	Pembahasan dan Persetujuan Bersama
						6	Evaluasi Gubernur
						7	Penetapan Perda dan penyampaian Laporan ke Kementrian Keuangan
6	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	Terwujudnya Pengelolaan dan Penatausahaan kas Daerah	Persen	100	43,419,399	1	Melakukan Rekon dengan BPJS Kesehatan
						2	Melakukan Rekon dengan PT Taspen
						3	Mengirimkan laporan pembayaran PFK (Perhitungan FihaK Ketiga)
						4	Monitoring pengeluaran dan penerimaan daerah
						5	Membuat laporan posisi kas pada rekening umum daerah

								7	Penunjang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan aplikasi SIPKD	bulan	12	165,538,920	1	Memastikan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dapat diakses oleh seluruh SKPD
														2	Mengkoneksikan seluruh Aplikasi yang terhubung dengan Aplikasi SKPD
														3	Memberi arahan dan Asistensi kepada SKPD dalam pengoperasian Aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah
								8	Tata Kelola Program Hibah Jalan Daerah	Terlaksananya Tata Kelola PHJD	Tahun	2	90,000,000	1	Mengirimkan PHD (Perjanjian Hibah Daerah) ke Kementrian Keuangan antara Pe,erintah pusat dan Pemerintah Kab. Pessel yang telah di tandatangani Kepala Daerah
														2	Membuat dan Mengirimkan Dokumen ke Kementrian Keuangan untuk permintaan pencairan dan penyaluran Hibah Daerah
														3	Menyiapkan dokumen pendukung untuk pelaksanaan verifikasi oleh tim teknis Kementrian PUPR
Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Berkualitas	1	Persentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis	20%	40%	60%	85%	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas jabatan dan operasional	unit	1	536,717,900	1	Survei Harga dan kesesuaian dengan RKA
														2	Order dan Input LPSE
														3	Penerimaan Barang, cek dan Bayaran
							Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan BMD	buku	1058	133,262,609	1	Pengumpulan data dan Rekon dengan SKPD
														2	Input KIB pada SIPKD dan Akuntansi Aset
														3	Audit BPK dan Penerimaan LHP
														4	Finalisasi dan Cetak laporan BMD
								2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	buku	90	22,217,190	1	Pembentukan Tim RK BMD
														2	Pembahasan RK BMD (Awal dan Perubahan)
														3	Penyusunan Buku RK BMD
								3	Penghapusan Barang-Barang Inventaris	Terlaksananya Penghapusan BMD	bulan	12	31,872,500	1	Pembentukan Tim Penghapusan
														2	Penerimaan Usulan SKPD
														3	Verifikasi oleh Tim
														4	Penyusunan SK Penghapusan
														5	Pengesahan SK dan penghapusan dari KIB
								4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi BMD	SKPD	45	210,787,713	1	Penyiapan Inbup dan SE
														2	Rapat Koordinasi Persiapan
														3	Pembentukan Tim di SKPD
														4	Pelaksanaan Inventarisasi di SKPD
														5	Rapat Koordinasi Evaluasi
														6	Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi
														7	Penyerahan Laporan Hasil Inventarisasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD	1	Hasil Penilaian AKIP BPKD	A	A	A	A		1	Program Pelayanan Administrasi	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPKD	1 SKPD	792,361,344	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkup BPKD
								2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPKD	1 SKPD	493,384,000	2	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana ASN yang memadai lingkup BPKD
							JUMLAH						**4,668,451,706**		

Painan, 4 Januari 2021
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

SUHANDRI SE, MM
NIP. 19700608 200212 1 003